

RENCANA AKSI OPEN GOVERNMENT INDONESIA TAHUN 2013

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B06 & B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OG1P1: LAYANAN DASAR</b>							
OG1P1A1: Mendorong transparansi, dan akuntabilitas layanan publik di Kepolisian RI	Kepolisian Republik Indonesia	Pemda Provinsi, Kabupaten, & Kotamadya	Publikasi layanan publik Kepolisian menyangkut layanan pengurusan SIM, STNK/BPKB Surat Keterangan Catatan Kepolisian SKCK	Terpublikasikannya informasi layanan meliputi jenis layanan, mekanisme/prosedur, biaya dan waktu melalui poster yang terkait dengan pengurusan SIM, STNK/BPKB, Surat Keterangan Catatan Kepolisian SKCK di seluruh wilayah Sumatera, Jawa, Bali	<b>TARGET B06:</b> Tersusunnya desain layanan publikasi melalui poster <b>TARGET B12:</b> Terpublikasikannya informasi layanan meliputi jenis layanan, mekanisme/prosedur, biaya dan waktu, melalui poster di wilayah Provinsi Sumatera, Jawa dan Bali	B06:  B12: XX%	
			Beroperasi sistem pengaduan layanan Surat Tilang, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), SIM dan STNK/BPKB	Tersedianya sistem pengaduan layanan Surat Tilang, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), SIM dan STNK/BPKB di kantor SAMSAT, yang beroperasi di seluruh Provinsi Sumatera, Jawa dan Bali	<b>TARGET B06:</b> Tersusunnya draft mekanisme sistem pengaduan layanan SIM/STNK/BPKB di kantor SAMSAT utk wilayah Sumatera, Jawa dan Bali <b>TARGET B12:</b> Terpublikasinya layanan informasi publik Kepolisian terkait SIM, STNK, dan BPKB secara rinci melalui poster dan media publik lainnya, termasuk mekanisme sistem pengaduannya di seluruh wilayah Provinsi Sumatera, Jawa dan Bali	B06:  B12: XX%	
			Terlaksananya Sosialisasi aktif cara mengendarai kendaraan bermotor dengan aman melalui radio dan televisi.	Sosialisasi aktif cara mengendarai kendaraan bermotor dengan aman melalui radio dan televisi.	<b>TARGET B06:</b> Tersusunnya draft/pedoman/panduan sosialisasi cara mengendarai kendaraan bermotor dengan aman <b>TARGET B12:</b> Sosialisasi/kampanye mengendarai kendaraan bermotor dengan aman di radio dan televisi	B06:  B12: XX%	
OG1P1A2: Mendorong transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pelaksanaan program BOS	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Kemendagri, Pemerintah Provinsi/Kab/Kota	Transparansi alokasi dan pemanfaatan dana BOS dalam rangka meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas program BOS	Terpublikasikannya data alokasi dan penggunaan BOS untuk masing - masing sekolah pada : a. Website Kemendikbud untuk sekolah di 33 Provinsi. b. Papan pengumuman seluruh sekolah penerima di Jawa dan Bali.	<b>TARGET B06:</b> a. Desain publikasi data alokasi dan penggunaan dana BOS di website Kemendikbud untuk sekolah di 33 provinsi b. Desain publikasi di papan pengumuman. <b>TARGET B12:</b> a. Terpublikasinya data alokasi dan penggunaan BOS di website Kemendikbud untuk sekolah di 33 provinsi b. Terpublikasinya data alokasi dan penggunaan dana BOS di papan pengumuman seluruh sekolah penerima di Jawa & Bali	B06:  B12: XX%	
OG1P1A3: Peningkatan kualitas transparansi kementerian Agama	Kementerian Agama	Kementerian Perhubungan	Transparansi layanan publik menyangkut pelaksanaan ibadah haji di Kementerian Agama	Publikasi layanan Haji di websiteKementerian agama meliputi: a) rincian biaya haji; b) Jumlah keberangkatan haji berdasarkan Kabupaten/ Kota; c) Daftar Rencana Keberangkatan berdasarkan Kloter dan Embarkasi; dan d) Layanan status antrian haji	<b>TARGET B06:</b> Desain layanan dan desain publikasinya yang terkait dengan jumlah keberangkatan haji, daftar rencana keberangkatan dan layanan status antrian haji. <b>TARGET B12:</b> Terpublikasikannya layanan haji di website kementerian agama meliputi: a) rincian biaya haji; b) Jumlah keberangkatan haji berdasarkan Kabupaten/ Kota; c) Daftar Rencana Keberangkatan berdasarkan Kloter dan Embarkasi; dan d) Layanan status antrian haji	B06:  B12: XX%	
			Publikasi pengelolaan setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH)	<b>TARGET B06:</b> Desain publikasi pengelolaan setoran BIPH <b>TARGET B12:</b> Terpublikasinya informasi pengelolaan setoran BPIH	B06:  B12: XX%		
OG1P1A3: Mendorong transparansi, dan akuntabilitas layanan publik di Kantor Urusan Agama (KUA)	Kementerian Agama	Kemendagri, Pemda Provinsi, Kabupaten & Kota	Transparansi informasi layanan publik pernikahan di Kantor Urusan Agama	Terpublikasinya informasi layanan pernikahan meliputi mekanisme/prosedur, biaya dan waktu layanan melalui poster serta tersedianya sistem pengaduan di Kantor Urusan Agama di Kabupaten/Kotamadya seluruh Provinsi Jawa, Sumatera dan Bali	<b>TARGET B06:</b> a. Desain poster layanan informasi pernikahan b. Desain sistem pengaduan di Kantor Urusan Agama di Kabupaten/Kotamadya seluruh Provinsi Jawa, Sumatera dan Bali <b>TARGET B12:</b> a. Terpublikasinya informasi layanan pernikahan meliputi : mekanisme /prosedur, biaya dan waktu layanan melalui poster serta tersedianya sistem pengaduan di Kantor Urusan Agama di Kabupaten/Kotamadya seluruh Provinsi Jawa, Sumatera dan Bali b. Beroperasinya sistem pengaduan di Kantor Urusan Agama di Kabupaten/Kotamadya seluruh Provinsi Jawa, Sumatera dan Bali	B06:  B12: XX%	
OG1P1A4: Mendorong perlindungan atas hak konsumen pengguna jalan tol	Kementerian PU		Transparansi informasi Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) kepada masyarakat	Terpublikasikannya kepada masyarakat informasi SPM jalan tol serta perusahaan pengelola jalan tol	<b>TARGET B06:</b> Desain publikasi informasi SPM jalan tol di website <b>TARGET B12:</b> Terpublikasikannya informasi SPM jalan tol melalui website.	B06:  B12: XX%	
<b>OG1P2: LAYANAN INVESTASI DAN USAHA</b>							

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B06 & B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
OGI2PIA1: Mendorong investasi usaha melalui integrasi kebijakan dan regulasi mengenai pertanahan di Indonesia dalam bentuk satu dokumen	BPN	Kemendagri, Pemda Prov & Kab/Kota, Bank Indonesia, KemenPU, Kementan, Kemenhut, Kemenindag, Kemenpera, Kemenkeu, KemenKopUKM, BKPM, dll	Transparansi informasi mengenai seluruh regulasi pertanahan yang disajikan dalam satu dokumen terintegrasi	Diterbitkannya buku/dokumen/file yang telah mengintegrasikan semua regulasi menyangkut pengurusan kepemilikan dan penggunaan tanah	<b>TARGET B06:</b> a. Tersusunnya draft buku/dokumen/file yang telah mengintegrasikan semua regulasi menyangkut pengurusan kepemilikan dan penggunaan tanah b. Terlaksananya konsultasi public menyangkut draft dokumen/buku  <b>TARGET B12:</b> a. Diterbitkannya buku/dokumen/file yang telah mengintegrasikan semua regulasi menyangkut pengurusan kepemilikan dan penggunaan tanah b. Publikasi melalui website BPN	B06:  B12: XX%	
OGI2PIA2: Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan pengelolaan Hutan	Kementerian Kehutanan	Kemenkeu, Kemendag, Kemenprind, Kemendagri, Kemen PU, Kemenhub, Kemenakertrans, Bappenas, BKPM (Note: ditambahkan beberapa lain Menteri yg merupakan anggota Denas KEK. Instansi terkait adalah seluruh anggota Denas KEK	Transparansi informasi menyangkut aktivitas pengelolaan sumber daya khususnya produk kehutanan.	Terpublikasikannya data dan informasi produksi dan peredaran hasil hutan, dan luran Hasil Hutan (PSDH & DR), serta beroperasinya timber tracking system di 88 unit manajemen (perusahaan).	<b>TARGET B06:</b> 1. Terbitnya PerMenhut tentang kewajiban pelaporan data produksi dan peredaran hasil hutan dan luran Hasil Hutan (PSDH & DR) 2. Penyempurnaan design website Kemenhut 3. Tersusunnya draft SOP Pengaduan masyarakat melalui website termasuk calon PIC di masing-masing unit  <b>TARGET B12:</b> 1. Terpublikasikannya data dan informasi menyangkut pengelolaan hutan melalui Website kemenhut meliputi: data produksi dan peredaran hasil hutan dan luran Hasil Hutan (PSDH & DR) 2. Penyempurnaan website Kemhut user friendly dan navigasi yang baik 3. Diterbitkannya SOP dan tersusunnya laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui website	B06:  B12: XX%	
OGI2PIA3: Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan pengelolaan Sumber Daya Alam	Kementerian ESDM	BUMN, Kemendagri, SKK Migas, Pemprov, Pemkab dan Pemkot	Transparansi informasi menyangkut aktifitas pengelolaan sumber daya alam khususnya migas dan pertambangan	1. Terpublikasikannya data dan informasi mengenai informasi kegiatan perusahaan sumber daya alam migas dan pertambangan di website Kementerian ESDM meliputi: informasi produksi migas dan pertambangan; serta informasi penerimaan migas dan pertambangan; daftar ijin usaha pertambangan yang telah Clean and Clear (CnC). 2. Terpublikasinya website www.kip.esdm.go.id	<b>TARGET B06:</b> 1. Desain publikasi informasi kegiatan perusahaan sumber daya alam migas, dengan penambahan menu "Statistik" dan data-data dalam bentuk PDF (Informasi produksi migas dan penerimaan migas dan pertambangan; daftar ijin usaha pertambangan yang telah Clean and Clear (CnC) 2. Desain website www.kip.esdm.go.id  <b>TARGET B12:</b> 1. Terpublikasikannya data dan informasi mengenai informasi kegiatan perusahaan sumber daya alam migas dan pertambangan di Website Kementerian ESDM meliputi: informasi produksi migas dan pertambangan dan informasi penerimaan migas dan pertambangan serta daftar ijin usaha pertambangan yang telah Clean and Clear (CnC) 2. Launching website www.kip.esdm.go.id	B06:  B12: XX%	
OGI2PIA4: Transparansi penerimaan pengelolaan sumber daya alam migas & pertambangan	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kemen.ESDM, Kemenkeu meliputi Ditjen Anggaran, Ditjen Migas, Ditjen Pajak, Kemendagri, Pemda.	Transparansi penerimaan sumber daya alam migas dan pertambangan dalam pelaksanaan EITI (Extractive Industries Transparency Initiative)	Terpublikasikannya laporan hasil rekonsiliasi EITI Indonesia yang mencakup informasi pembayaran dan penerimaan dari pajak dan nonpajak dari kegiatan industri ekstraktif migas dan pertambangan 2010-2011	<b>TARGET B06:</b> Tersedianya data rekonsiliasi EITI Indonesia  <b>TARGET B12:</b> Terpublikasinya laporan penerimaan negara tahun 2010-2011	B06:  B12: XX%	
<b>OGI3PI: INFRASTRUKTUR IMPLEMENTASI OPEN GOVERNMENT INDONESIA</b>							
OGI3PIA1: Operasional layanan informasi Badan Publik lingkup Pemerintah Pusat melalui pembentukan PPIID Badan Publik dan perangkatnya	Kemenkominfo	KIP, K/L	Pembentukan PPIID badan publik dan perangkat pendukungnya di lingkup Pemerintah Pusat	Terbentuk PPIID badan publik, SOP layanan informasi, dan daftar informasi publik di 70 Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)	<b>TARGET B06:</b> Terbentuknya PPIID di 50 LPNK  <b>TARGET B12:</b> Terbentuknya PPIID di 70 LPNK	B06:  B12: XX%	
OGI3PIA2: Mendorong Transparansi Layanan Perizinan Usaha/Penanaman Modal di Daerah	BKPM	Kemendagri, Pemprov., Pemkab dan Pemkot	Transparansi mengenai status perizinan usaha oleh badan pemerintah daerah pada publik	Beroperasinya tracking system layanan izin usaha/penanaman modal di 10 Provinsi dan 10 Kabupaten/Kota	<b>TARGET B06:</b> Terumuskannya rencana kerja implementasi operasionalisasi tracking system layanan usaha/penanaman modal di 10 provinsi dan 10 kabupaten/kota  <b>TARGET B12:</b> Beroperasinya tracking system layanan izin usaha/penanaman modal di 10 Provinsi dan 10 Kabupaten/Kota	B06:  B12: XX%	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B06 & B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
OGI3P1A3: Mendorong percepatan pembentukan operasional layanan informasi lingkup Pemda melalui pembentukan PPID Pemda dan perangkatnya	Kemendagri	UKP4, Kemenkominfo dan Pemda	Pembentukan PPID dan perangkat pendukungnya di lingkup Pemda	Terlaksananya Asistensi dan supervisi percepatan pembentukan Operasional layanan informasi lingkup Pemda	TARGET B06: a. Terkirimnya radiogram dan/atau surat edaran Mendagri untuk mendorong percepatan pembentukan PPID Pemda; b. Tersusunnya strategi dan rencana kerja pembentukan PPID Daerah c. Terbitnya SK Tim Asistensi & Supervisi pembentukan PPID Pemda; d. Tersusunnya laporan pelaksanaan asistensi dan supervisi pembentukan PPID Pemda;	B06:	
					TARGET B12: a. Terkirimnya radiogram dan/atau surat edaran Mendagri untuk Evaluasi pembentukan PPID Pemda; b. Tersusunnya laporan evaluasi, asistensi & supervisi pembentukan PPID Pemda; c. Terlaksananya Rakornas PPID Pemda.	B12: XX%	
<b>OGI4P1: TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN</b>							
OGI4P1A1: Mendorong Implementasi Open Government secara penuh di Provinsi /Kab/Kota Percontohan	UKP4	Pemda Provinsi, Kabupaten, & Kotamadya	Melakukan penancangan program OG di wilayah - wilayah percontohan	Terlaksananya Pilot Project implementasi Open Government di 1 Provinsi/Kab/Kota	TARGET B06: Terumuskannya strategi dan rencana kerja implementasi pilot project di 1 Provinsi/Kab/Kota	B06:	
					TARGET B12: Terlaksananya pilot project OG di 1 provinsi/kab/kota.	B12: XX%	
OGI4P1A2: Mendorong pengintegrasian proses perencanaan penganggaran berbasis kinerja di tingkat pusat	Bappenas	Kementerian Keuangan	Adanya sistem informasi Renja K/L-RKA/KL serta indikator kinerja program	Ditetapkannya PP dan aturan pelaksanaannya tentang pemberian fasilitas perpajakan, kepabeanan dan cukai	TARGET B06: Desain sistem informasi aplikasi renja yang terintegrasi	B06:	
					TARGET B12: Publikasi informasi renja K/L RKA K/L	B12: XX%	
OGI4P1A3: Memastikan terpublikasinya dokumen RKA-KL, DIPA, realisasi anggaran 3 bulanan dan Laporan Realisasi Anggaran pada website seluruh Kementerian Lembaga	Kemenkeu	UKP4, BPKP	Melakukan Monitoring atas ketersediaan informasi RKA-KL, DIPA, realisasi anggaran 3 bulanan dan Laporan Realisasi Anggaran pada website masing2 K/L	Terpublikasinya RKA-KL, DIPA, Realisasi Anggaran 3 Bulanan dan Laporan Realisasi Anggaran pada seluruh website Kementerian/Lembaga	TARGET B06: Laporan Monitoring dan tindak lanjut monitoring terhadap ketersediaan informasi RKA KL, DIPA, realisasi anggaran 3 bulanan dan laporan realisasi anggaran pada website masing-masing K/L	B06:	
					TARGET B12: Terpublikasinya RKA-KL, DIPA, Realisasi Anggaran 3 Bulanan dan Laporan Realisasi anggaran pada seluruh website Kementerian/Lembaga	B12: XX%	